

	Jurnal Abdimas Indonesia Berkarya	
	Vol. 01, No. 06, November 2025 Hal 195-202	E-ISSN : 3089-591X P-ISSN : 3089-6088
	https://ojs.gelcipnus.org/index.php/jaib	

Implementasi PPMU-PK 2025: Peningkatan Kapasitas Manajerial UMKM dan Koperasi di Kota Parepare Melalui Edukasi Pelaporan Keuangan, Keberlanjutan, dan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual

Nadhirah Nagu¹, Mursalim Nohong², Anas Iswanto Anwar³, Agus Bandang⁴, Darwis Said⁵, Ratnawati⁶, Maskun⁷, Hasbir Paserangi⁸, Marwah⁹, Fransiscus Franci Dagi¹⁰

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

^{6,7,8,9,10} Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: nadhirahnagu@fe.unhas.ac.id¹, mursalimnohong@fe.unhas.ac.id², aianwar@fe.unhas.ac.id³, agusbandang82@gmail.com⁴, darwissaid@yahoo.com⁵, ratnawati@unhas.ac.id⁶, maskun@unhas.ac.id⁷, hasbir_paserangi@yahoo.co.id⁸, fransiscusdagi@gmail.com¹⁰

Article Info

Article history:

Received November 09, 2025

Revised November 14, 2025

Accepted November 30, 2025

Keywords:

UMKM
Koperasi
HKI
Laporan Keuangan
Laporan Keberlanjutan
Edukasi Hukum
Parepare

Keywords:

UMKM
Second Keyword
SAK EMKM
Financial Report
Sustainability Report
Parepare

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi merupakan pilar fundamental perekonomian Indonesia, namun pertumbuhannya kerap terhambat oleh keterbatasan kapasitas manajerial. Kesenjangan ini termanifestasi dalam tiga area krusial: literasi dan pelaporan keuangan, kesadaran akan praktik bisnis berkelanjutan, serta pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menjawab tantangan tersebut, Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui program Pengabdian kepada Masyarakat menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Kota Parepare untuk menyelenggarakan workshop edukasi terpadu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajerial UMKM lokal dan pengurus Koperasi Merah Putih dengan memberikan pemahaman komprehensif mengenai penyusunan laporan keuangan sederhana, pengenalan konsep *sustainability report*, serta edukasi mengenai pentingnya HKI. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab yang melibatkan para ahli multidisiplin dari UNHAS. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan peserta pada ketiga area edukasi. Para pelaku usaha memperoleh pengetahuan fundamental untuk mengelola keuangan secara lebih akuntabel, mengadopsi prinsip keberlanjutan sebagai strategi keunggulan kompetitif, dan memahami urgensi HKI untuk melindungi aset tak berwujud usaha. Disimpulkan bahwa model edukasi terpadu yang sinergis antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah merupakan pendekatan yang efektif untuk pemberdayaan UMKM dan koperasi secara holistik, mendorong terciptanya ekosistem usaha yang lebih resilien, kompetitif, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Cooperatives are fundamental pillars of the Indonesian economy, yet their growth is often constrained by limited managerial capacity. This gap manifests in three crucial areas: financial literacy and reporting, awareness of sustainable business practices, and understanding of Intellectual Property Rights (IPR). In response to these challenges, Hasanuddin University (UNHAS), through its Community Service program, established a strategic partnership with the Parepare City Government to conduct an integrated educational workshop. This activity aimed to enhance the managerial capacity of local MSMEs and the management of the Merah Putih Cooperative by providing a comprehensive understanding of simple

financial statement preparation, introducing the concept of sustainability reporting, and delivering education on the importance of IPR. The implementation method utilized a participatory approach through expert-led presentations, discussions, and Q&A sessions involving a multidisciplinary team of experts from UNHAS. The results indicated a significant increase in understanding among participants across all three educational areas. Business actors gained foundational knowledge to manage finances more accountably, adopt sustainability principles as a competitive advantage strategy, and understand the urgency of IPR to protect intangible business assets. It is concluded that the integrated educational model, characterized by synergy between a university and local government, is an effective approach for holistic empowerment of MSMEs and cooperatives, fostering a more resilient, competitive, and sustainable business ecosystem

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



1. PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara konsisten terbukti sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Peran vital ini didukung oleh data statistik yang menunjukkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 61,07% [1]. Lebih lanjut, sektor ini mampu menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja nasional, menjadikan UMKM sebagai katup pengaman stabilitas sosial dan ekonomi [4]. Sejalan dengan pemberdayaan UMKM, pemerintah juga menggalakkan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan memperkuat dan pemeratakan ekonomi nasional [8]. Di Kota Parepare sendiri, pembentukan Koperasi Merah Putih di 22 kelurahan telah rampung dan menjadi salah satu fokus pemberdayaan ekonomi lokal.

Meskipun memiliki peran makroekonomi yang signifikan, UMKM dan koperasi dihadapkan pada tantangan internal yang sistemik dan menghambat potensi pertumbuhannya. Pertama, kesenjangan literasi dan pelaporan keuangan. Sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan usahanya dengan manajemen keuangan yang sederhana, seringkali mencampur keuangan usaha dengan keuangan pribadi dan belum mampu menyusun laporan keuangan yang terstruktur [13]. Rendahnya literasi keuangan ini menjadi penghalang utama dalam mengakses permodalan formal dari perbankan dan lembaga keuangan, karena ketiadaan laporan keuangan yang kredibel [2].

Kedua, terdapat kesenjangan kesadaran akan keberlanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, konsep pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) masih menjadi hal yang asing bagi mayoritas UMKM dan koperasi [7]. Padahal, integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam strategi bisnis bukan lagi hanya domain perusahaan besar, melainkan telah menjadi faktor penentu daya saing dan resiliensi usaha jangka panjang [5]. Pengenalan prinsip keberlanjutan pada UMKM dan koperasi merupakan sebuah langkah proaktif untuk mempersiapkan mereka menghadapi dinamika pasar di masa yang akan datang.

Ketiga, kesenjangan pemahaman hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pelaku UMKM dan koperasi seringkali rentan terhadap risiko hukum karena kurangnya literasi terkait perlindungan aset tak berwujud. Salah satu aspek yang paling krusial adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran HKI, khususnya merek dagang [6]. Akibatnya, identitas dan aset terpenting mereka (Misalnya, merek dan resep) tidak terlindungi dari potensi peniruan atau sengketa di kemudian hari, yang dapat merugikan citra dan nilai ekonomi usaha [9].

Kombinasi dari berbagai kesenjangan ini menciptakan sebuah siklus yang menghambat kemajuan UMKM dan koperasi. Keterbatasan dalam menyusun laporan keuangan menghalangi akses modal; ketiadaan perlindungan HKI melemahkan nilai dan keamanan merek; dan ketidaktauan akan prinsip keberlanjutan membatasi akses ke pasar modern kemudian hari. Siklus ini dapat mengunci entitas usaha dalam skala yang kecil dan menghambat mereka untuk tumbuh secara progresif.

Menyadari kompleksitas permasalahan tersebut, Universitas Hasanuddin (Unhas) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Parepare, melalui Dinas Tenaga Kerja, menginisiasi program "Kemitraan Strategis Unhas dengan Pemerintah Kota Pare-Pare". Program ini dirancang sebagai sebuah model intervensi yang tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi memberikan edukasi terpadu yang menyentuh ketiga area krusial tersebut secara simultan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaporan keuangan, pengenalan konsep keberlanjutan, dan penguatan kesadaran HKI bagi para pelaku UMKM dan pengurus Koperasi Merah Putih di Kota Parepare.

2. METODE

Kegiatan Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada pendekatan partisipatif dan kolaboratif, di mana mitra (Pemerintah Kota Parepare, pelaku UMKM lokal, dan pengurus Koperasi Merah Putih) dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Metodologi kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama yang sistematis, meliputi:

Tahap Persiapan: Dilakukan koordinasi awal dan analisis kebutuhan melalui serangkaian diskusi antara tim pengabdian dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. Pertemuan ini bertujuan untuk memvalidasi permasalahan prioritas yang dihadapi oleh UMKM binaan serta Koperasi Merah Putih yang baru terbentuk, dan menyepakati fokus program pada tiga pilar edukasi: keuangan, keberlanjutan, dan HKI.



Gambar 1. Survei awal koordinasi dengan Disnaker Kota Parepare

Selanjutnya, dibentuk tim pelaksana multidisiplin yang terdiri dari para pakar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Hukum (FH) Unhas. Komposisi tim yang beragam ini memungkinkan penyampaian materi yang komprehensif dan mendalam. Tim secara kolaboratif menyusun materi edukasi, modul pelatihan, materi presentasi, dan contoh kasus praktis dikembangkan secara khusus agar sesuai dengan konteks dan tingkat pemahaman para pelaku UMKM dan pengurus koperasi. Materi dirancang untuk bersifat aplikatif dan mudah diimplementasikan.

Tahap Pelaksanaan: Kegiatan inti program dilaksanakan dalam bentuk workshop intensif yang diselenggarakan di Kota Parepare. Meskipun tim pelaksana melakukan total empat kali kunjungan, artikel ini berfokus pada dua sesi edukasi utama yang menjadi inti dari transfer pengetahuan. Peserta kegiatan adalah para pelaku UMKM yang terdaftar sebagai binaan Dinas Tenaga Kerja serta perwakilan pengurus dari 22 Koperasi Merah Putih di Kota Parepare.

Metode penyampaian utama adalah penyuluhan interaktif, yang dikombinasikan dengan diskusi kelompok dan sesi tanya jawab untuk mendorong partisipasi peserta.

- Pertemuan Pertama (21 Juni 2025): Edukasi Keuangan dan Manajerial Umum: Sesi pertama difokuskan untuk membekali peserta dengan ilmu bisnis fundamental agar mampu mengelola usaha secara lebih profesional dan modern. Materi yang disampaikan mencakup spektrum yang luas, mulai dari penyusunan rencana bisnis (*business plan*), manajemen pemasaran dan keuangan, hingga pilar utama yaitu ilmu keakuntansian. Dalam pilar ini, peserta diajarkan konsep dasar akuntansi, pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta praktik penyusunan laporan keuangan sederhana. Selain itu, diperkenalkan pula konsep akuntansi sosial, lingkungan, dan *sustainability report* sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing.



Gambar 2. Pelepasan tim pengabdian untuk kunjungan perdana ke Kota Parepare



Gambar 3. Workshop Edukasi Keuangan dan Manajerial: Pengabdian Kepada Masyarakat di Aula Institut Teknologi BJ Habibie, Kota Parepare.

- Pertemuan Kedua (29 Agustus 2025): Edukasi Hukum: Sesi kedua secara spesifik membahas aspek hukum yang relevan bagi operasional UMKM dan koperasi. Fokus utama dari edukasi ini adalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Para narasumber menekankan urgensi pendaftaran merek dagang dan keotentikan resep sebagai alat untuk melindungi identitas, reputasi, dan aset tak berwujud dari sebuah usaha. Materi ini dirancang untuk menjawab keresahan para peserta yang dalam sesi diskusi banyak mengeluhkan maraknya produk tiruan yang merugikan usaha mereka. Dengan pemahaman ini, peserta diharapkan tidak hanya sadar akan pentingnya HKI, tetapi juga mengetahui langkah-langkah dasar untuk melindungi produk mereka secara hukum.



Gambar 4. Workshop Edukasi Hukum: Pengabdian Kepada Masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Tahap Evaluasi: Evaluasi dampak edukasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan transfer pengetahuan. Mekanisme evaluasi utama adalah penggunaan instrumen pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta di awal dan akhir kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, evaluasi kualitatif juga dilakukan melalui observasi partisipasi aktif, uji antusiasme, dan kualitas pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi.



Gambar 5. Sesi tanya jawab oleh pemateri dan peserta

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Kegiatan edukasi terpadu ini menghasilkan peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan pelaku UMKM dan pengurus Koperasi Merah Putih di Kota Parepare pada tiga area manajerial yang menjadi fokus utama. Pembahasan berikut menguraikan temuan di setiap pilar edukasi.

Peningkatan Pemahaman Laporan Keuangan Dasar

Dari sesi interaktif dan pre-test, terkonfirmasi bahwa kondisi awal mayoritas peserta sejalan dengan temuan umum pada entitas usaha kecil, yaitu belum adanya pencatatan keuangan yang terstruktur dan sistematis [10]. Praktek pencampuran keuangan usaha dan pribadi masih sering terjadi. Materi edukasi difokuskan pada konsep-konsep paling fundamental, dimulai dari pentingnya menerapkan konsep entitas bisnis untuk memisahkan aset pribadi dan usaha. Selanjutnya, peserta dibekali dengan teknik pembukuan sederhana dan

pengenalan komponen laporan keuangan dasar seperti Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi, juga diperkenalkan terkait arus kas usaha.

Edukasi mengenai pelaporan keuangan ini secara langsung menasar akar masalah yang menghambat akses UMKM dan koperasi ke lembaga keuangan formal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel menjadi salah satu alasan utama penolakan pengajuan kredit [11]. Dengan membekali para pelaku usaha pengetahuan untuk melakukan pencatatan keuangan yang rapi, program ini memberikan solusi konkret untuk meningkatkan "bankabilitas" mereka. Lebih dari sekedar pemenuhan syarat administratif, kemampuan menyusun laporan keuangan merupakan langkah awal menuju profesionalisme. Hal ini memungkinkan pemilik usaha untuk melakukan analisis kinerja dan membuat keputusan bisnis yang didasarkan pada data, bukan lagi hanya berdasarkan intuisi [12].

Pengenalan Konsep Keberlanjutan dan *Sustainability Reporting*

Konsep keberlanjutan dan *sustainability reporting* merupakan materi yang sepenuhnya baru bagi hampir seluruh peserta. Sesi edukasi dirancang untuk "menyederhanakan" konsep ini, menjauhkannya dari citra sebagai sebuah kewajiban korporat yang rumit. Materi disajikan sebagai sebuah kerangka strategis praktis melalui pengenalan konsep Triple Bottom Line (*Profit, People, Planet*). Narasumber memberikan contoh-contoh yang relevan dengan skala UMKM dan koperasi, seperti efisiensi penggunaan sumber daya untuk menekan biaya (aspek *Planet dan Profit*) dan memprioritaskan pemasok bahan baku lokal untuk mendukung ekonomi komunitas (aspek *People dan Profit*).

Inisiatif untuk memperkenalkan pelaporan keberlanjutan pada level UMKM dan koperasi merupakan sebuah langkah inovatif dan berwawasan ke depan. Literatur mengenai *sustainability reporting* umumnya berfokus pada perusahaan besar [15]. Namun, penerapan prinsip-prinsipnya pada skala mikro dan kecil dapat memberikan keunggulan kompetitif. Edukasi ini membekali para pelaku usaha untuk menyelaraskan praktik bisnis mereka dengan tren kesadaran konsumen yang semakin peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Dengan demikian, program ini menanamkan pemahaman bahwa keberlanjutan bukanlah beban, melainkan investasi strategis untuk membangun legitimasi, kepercayaan, dan nilai jangka panjang bagi usaha [3].

Penguatan Kesadaran Hukum: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Prosesi kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya aspek HKI dalam menjalankan usaha. Fokus utama materi adalah pada urgensi pendaftaran merek dagang dan originalitas resep untuk melindungi identitas dan aset tak berwujud dari usaha mereka. Dalam sesi diskusi, para peserta secara aktif menyuarakan keluhan mereka mengenai maraknya produk tiruan yang mereka temui di pasar. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab meniru produk mereka, namun para peserta mengaku masih belum memahami dasar hukum yang dapat melindungi mereka dalam kasus-kasus seperti ini.

Penekanan pada literasi HKI ini berfungsi sebagai mitigasi risiko proaktif. Rendahnya tingkat pendaftaran merek di kalangan UMKM Indonesia merupakan sebuah kerentanan yang terdokumentasi dengan baik, di mana banyak usaha kehilangan identitas mereknya karena ditiru oleh pihak lain [6]. Edukasi ini secara langsung menjawab keluhan peserta mengenai produk tiruan. Dengan memahami prosedur pendaftaran HKI, para pelaku usaha kini memiliki

pengetahuan tentang dasar hukum untuk melindungi merek mereka. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif yang menjadi “senjata hukum” untuk melawan oknum yang meniru produk, sehingga memberikan kepastian dan keamanan bagi keberlangsungan usaha [14]. Dengan demikian, pengetahuan HKI tidak lagi dipandang sebagai beban kepatuhan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengamankan aset, meningkatkan valuasi bisnis, dan memperkuat daya saing.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Implementasi Kegiatan pengabdian melalui workshop edukasi terpadu yang diselenggarakan atas kemitraan strategis Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Kota Parepare telah terbukti menjadi model intervensi yang efektif untuk menjawab tantangan kapasitas manajerial yang dihadapi oleh UMKM dan Koperasi Merah Putih. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha pada tiga pilar fundamental bisnis modern: akuntabilitas keuangan, praktik keberlanjutan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Para peserta memperoleh pengetahuan dasar yang esensial untuk menyusun laporan keuangan sederhana, sebuah keterampilan krusial untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan formal dan pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, pengenalan konsep keberlanjutan dan telah membuka wawasan baru untuk membangun keunggulan kompetitif jangka panjang dan meningkatkan citra usaha. Terakhir, edukasi hukum yang berfokus pada HKI telah membekali mereka dengan alat mitigasi risiko yang vital untuk melindungi aset usaha dan identitas merek.

Sinergi antara keahlian akademis multidisiplin dari perguruan tinggi dengan fasilitasi dari pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan program ini. Model kolaboratif seperti ini direkomendasikan untuk dapat direplikasi sebagai strategi yang terukur dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal di Indonesia, guna mendorong terciptanya sektor usaha yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Hasanuddin dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin atas dukungan pendanaan dan fasilitasi yang telah diberikan, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Parepare atas kerja sama dan dukungan yang luar biasa dalam pelaksanaan program pelatihan bagi pelaku UMKM dan koperasi di Kota Parepare. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak lupa, tim pelaksana juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh peserta pelatihan yang telah berpartisipasi aktif dan antusias selama kegiatan berlangsung. Semangat belajar dan keterbukaan peserta dalam menerima pengetahuan baru menjadi faktor penting bagi keberhasilan kegiatan pengabdian ini. Semoga seluruh pihak yang terlibat senantiasa mendapatkan keberkahan dan kegiatan ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi penguatan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi di Kota Parepare.

REFERENSI

- [1] Anggi Pranata, dkk. (2025). Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 158-166.
- [2] Aribawa, D. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(1), 1–13.
- [3] Arifin, S. (2024). Pengungkapan Sustainability Reporting terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 41–49.
- [4] Dayanti, R., & Prasetyo, A. (2023). Peran UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(7), 3820-3827.
- [5] Fitriyani, T., & Raharja, S. (2025). Apakah Sustainability Reporting Penting Bagi Kinerja Perusahaan?. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 297-289.
- [6] Hariss, A., Fauzia, N., & Ramaya, P. I. (2023). Kesadaran Hukum Pengusaha UMKM dalam Pendaftaran Merek Dagang di Kemenkumham Kota Jambi. *Wajah Hukum*, 7(1), 155-165.
- [7] Hidayah, N., Fitri, A., & Sari, D. P. (2023). Penyuluhan Pentingnya Laporan Keberlanjutan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Rangka Mempertahankan Keberlanjutan Usaha. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(3), 501-508.
- [8] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025, 21 Juli). Presiden Prabowo Resmikan Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, diakses melalui: <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-resmikan-kelembagaan-80-081-koperasi-des-kelurahan-merah-putih/>
- [9] Makbul, M., Makhrus, & Fathaniyah, L. (2023). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa. *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 47-55.
- [10] Mustamin, I., Wahyuni, & Risna, A. (2025). Edukasi Pembuatan Laporan Keuangan Pada UMKM Berbasis SAK EMKM Di Desa Moncongkomba Kecamatan Polsel Kabupaten Takalar Tahun 2025. *Jurnal Abdimas Indonesia Berkarya*, 1(4), 135-141.
- [11] Purwanto, P., Safitri, D. Y., & Pudail, M. (2023). Edukasi Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1-14.
- [12] Rasjid, Y., Nurfalaq, M., & Akib, I. (2024). Penyuluhan UMKM bagi Warga Desa Paccellekang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 0–6.
- [13] Riyani, R., & Virgi, E. (2025). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Literasi Keuangan di Kalangan UMKM di Pesawaran. *MDP Student Conference (MSC)*, 4(2), 944-950.
- [14] Siregar, A., Saidin, O., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 161–169.
- [15] Tarigan, J., & Samuel, H. (2015). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 88–101.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.